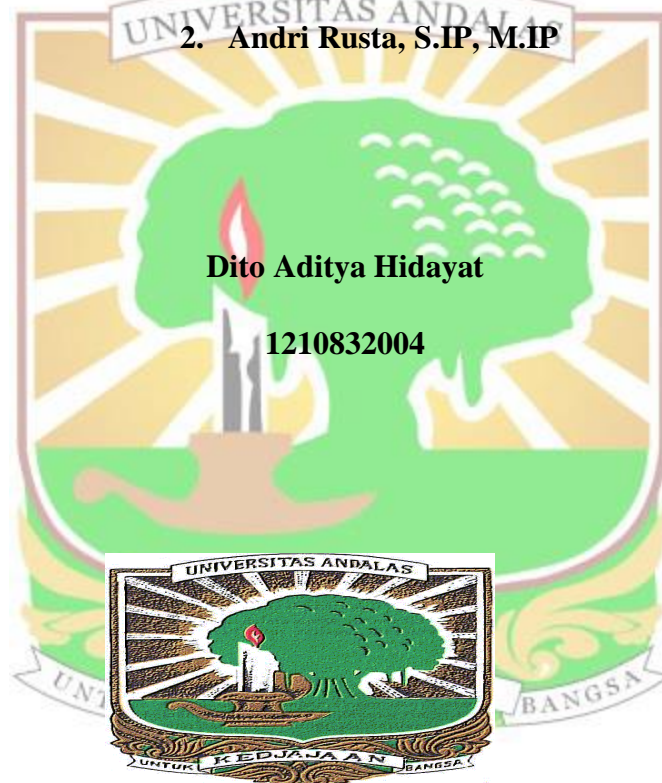


**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG MUSYAWARAH TUNGKU TIGO SAJARANGAN (MTTS)  
DI KABUPATEN SOLOK**

**Skripsi**

**Nama Pembimbing :**

- 1. Drs. Tamrin, M.Si**
- 2. Andri Rusta, S.IP, M.IP**



**Dito Aditya Hidayat**

**1210832004**

**JURUSAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2017**

## ABSTRAK

**DITO ADITYA HIDAYAT, 1210832004, Jurusan Ilmu Politik, FISIP-UNAND Padang. Dengan Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati nomor 10 Tahun 2012 tentang Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan (MTTS) di Kabupaten Solok. Sebagai Pembimbing I Drs. Tamrin, M.Si dan Pembimbing II Andri Rusta, S.IP, M.PP.**

MTTS merupakan wadah berkumpulnya semua elemen masyarakat untuk bermusyawarah dalam membicarakan banyak hal di tingkat nagari (desa adat), tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik antar masyarakat dalam hal apapun melalui musyawarah dan untuk mengembalikan identitas Minangkabau sesungguhnya yaitu musyawarah untuk mufakat yang sesuai dengan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Secara umum implementasi MTTS di Kabupaten Solok ini masih belum berjalan maksimal di nagari-nagari tempat diadakan penelitian dikarenakan oleh beberapa yang masih ditemukan baik yang berasal dari internal maupun yang berasal dari eksternal. Namun, Standar dan sasaran yang diinginkan dalam Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2012 tentang Implementasi Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan (MTTS) di Kabupaten Solok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan Implementasi Peraturan Bupati nomor 10 tahun 2012 tentang Musyawarah Tungku tigo Sajarangan (MTTS) di Kabupaten Solok, berikut interaksi aktor yang terlibat serta kendala-kendala yang dihadapi dalam program MTTS. Teori yang digunakan adalah teori implementasi (Donald Van Meter & Carl E. Van Horn, 1975), Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil dari penelitian ini Implementasi Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan (MTTS) di Kabupaten Solok ini sudah hampir berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat perbedaan pemahaman dan sudut pandang dari berbagai informan serta juga terdapat perbedaan proses pengimplementasian di Nagari-nagari di Kabupaten Solok, dan yang perlu dibenahi adalah sosialisasi dan evaluasi oleh pemerintah dan instansi kepada nagari dalam pemahaman terhadap Implementasi Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan (MTTS) di Kabupaten Solok ini.

*Kata Kunci: Implementasi, Kendala Kebijakan, Musyawarah tungku Tigo Sajarangan*



## ABSTRACT

**DITO ADITYA HIDAYAT, 1210832004, Jurusan Ilmu Politik, FISIP-UNAND Padang. Dengan Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bupati nomor 10 Tahun 2012 tentang Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan (MTTS) di Kabupaten Solok. Sebagai Pembimbing I Drs. Tamrin, M.Si dan Pembimbing II Andri Rusta, S.IP, M.PP.**

MTTS is an organization gathering all elements of society to deliberation in talking about a lot of things at the level of villages (indigenous villages), the aim is to resolve conflicts between communities in any case through consultation and to restore Minangkabau actually that deliberation in accordance with the philosophy of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. In general the implementation MTTS in Solok is still has not been run optimally in Nagari place due to research conducted by some who still found both from internal as well as from external. However, the standards and the desired target in the decree number 10 of 2012 on the implementation of the Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan (MTTS) in Solok. The Purpose of this study is to describe the implementation of the decree number 10 of 2012 on the Council Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan (MTTS) in Solok, following the interaction of the actors involved as well as the constraints faced in MTTS program. The theory of implementation (Donal Van Meter & Carl E. Van Horn, 1975), this study used a qualitative approach and descriptive. The Results of this study Implementation Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan (MTTS) in Solok is already almost gone well, although there are differences in the process of implementing in The Villages in Solok, and the need addressed is the dissemination and evaluation by government and agencies to villages in the understanding of the implementation of the Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan (MTTS) in Solok.

*Keywords: Implementation, Obstacles Of Policy, Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan*



